

TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI SANIANG BAKA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK

Muhammad Hakiki

Jurusan Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas

hakiki852@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka yang dalam pelaksanaannya terkendala masalah, diantaranya kendala dana yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan faktor budaya kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya belum berdampak bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan teori manajemen menurut Fayol. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan para pemangku kepentingan dalam kepariwisataan supaya dalam pelaksanaan nantinya sejalan dengan prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dalam setiap prosesnya berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Pengelolaan pariwisata saat ini sedang berjalan dan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar karena permasalahan yang ada sehingga pengelolaan pariwisata belum berjalan efektif dan keikutsertaan partisipasi masyarakat masih rendah.

Kata Kunci : *Tata Kelola Pariwisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat.*

Abstract

This research was conducted due to the problems found in the society-based tourism governance applied in Nagari Saniang Baka; lack of fund, limited infrastructure, and the local culture, and these brought less positive impact into the society. The aim of the research was to describe the society-based tourism governance in Nagari Saniang Baka, X Koto Singkarak, Solok, West Sumatera. This research refers to Act No 10 2009 about tourism and Fayol's management theory. Society-based tourism governance involves the stake holders in tourism so that when implemented later it will be in accordance with the main principle of society-based tourism. The research method was descriptive qualitative. The result showed that there were some aspects which influenced the society-based tourism governance; planning, organizing, directing, coordinating and controlling which involved society participation in every process. The tourism governance is on process and demands the society participation, however the implementation did not run as expected due to the problems mentioned. Thus, it has not run effectively because of low participation from the society.

Keyword: *tourism governance, society-based tourism.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki kekayaan potensi sumber daya yang membentang diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kekayaan dan keunikan sumber daya tersebut memberikan berbagai atribut penting dan strategis bagi Indonesia dalam pengelolaan potensi pariwisata yang dimilikinya. Kekayaan dan keunikan sumber daya tersebut juga menjadi modal dasar yang sangat penting bagi Indonesia dalam pengelolaan produk pariwisatanya untuk menjadi destinasi atau tujuan pariwisata bagi pangsa pasar wisatawan dari berbagai kawasan di dunia. Potensi pada sumber daya yang dimiliki Indonesia dalam upaya pemanfaatannya merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memajukan negara. Jika dilihat secara umum keragaman sumber daya dan budaya di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pelestarian budaya di Indonesia. Oleh karenanya, perlu ada pengelolaan yang mana nantinya dapat melestarikan potensi sumber daya serta mensejahterakan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini juga adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proposionalitas dengan tujuan meningkatkan kebutuhan ekonomi, menentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta meningkatkan kebudayaan dan kelestarian lingkungan.¹

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang 10 Tahun 2009² pengembangan dan pengelolaan potensi wisata di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat mempunyai objek wisata yang cukup unik dengan keunggulan pesona alam serta pemandangannya yang begitu indah, posisi yang strategis dikelilingi danau Singkarak dan pegunungan bukit barisan. Beberapa potensi objek wisata yang menjanjikan diantaranya Aia Tajun Batang Raso dan Wisata Terjun Paralayang yang menampilkan keindahan alam yang siap memanjakan mata. Potensi objek wisata ini sedang dalam tahap pengembangan dan pengelolaan.

¹Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Bab III pasal 5

² Ibid

Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* dalam dunia pariwisata yang mempunyai sumber daya yang dimiliki, berupa adat istiadat, tradisi dan budaya, serta kedudukannya sebagai tuan rumah. Selain itu masyarakat juga berperan sebagai penggerak serta pengembangan sebuah potensi pariwisata di daerahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan pariwisata di suatu daerah. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat.³

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata lebih banyak ditentukan oleh peran kebijakan pemerintah yang ikut serta secara aktif membangun regulasi untuk pengembangan kepariwisataan⁴. Dalam rangka memahami peran kelembagaan pada pengembangan pariwisata, UNWTO (2002) mengembangkan pilar segitiga meliputi *environment*, *community* dan *industry*. Hal ini juga tertuang dalam Kementerian kebudayaan dan Pariwisata melakukan inovasi terbaru dengan menggagas tata kelola daerah tujuan wisata berlabel DMO (*Destination Management Organization*) yang mana dikenal sebagai pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis dengan memanfaatkan jejaring informasi dan teknologi yang tersistem secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/kelompok, industry, akademisi serta pemerintah⁵

Pemerintah merupakan salah satu bagian dari pilar dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata yang mana pemerintah melaksanakan pendampingan dan pengelolaan pariwisata. Konsep pengelolaan DMO (*Destination Management Organization*) diartikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi serta pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik. Pemerintahan Nagari Saniang Baka bersama Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Tangaya dalam tahap pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Nagari Saniang Baka dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³Imade Adikampana, Pariwisata Berbasis masyarakat, Cakra Pres, Bali, 2017

⁴Jeffries, D, Government and Tourism. Oxford, Butterworth-heineman, 2001

⁵UNWTO 2017 organisasi-pariwisata-dunia-atau-yang-dikenal-dengan-world-tourism.html hlm 2 tanggal 28 Februari 2021 Jam 14.00

(POKDARWIS) merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan dalam mendukung terciptanya iklim kondusif dan terwujudnya Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan) sehingga dapat mendorong dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan di suatu daerah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan⁷ dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif metode penelitian yang dilakukan secara alamiah atau naturalistik karena penelitian ini sendiri dilakukan berdasarkan pengumpulan data secara alamiah, dengan menggunakan metode dan dilakukan oleh peneliti berdasar kepada masalah yang terdapat di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak. Metode dalam penelitian ini, dilakukan secara alamiah atau naturalistik karena penelitian dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data secara alamiah, dengan menggunakan metode dan dilakukan oleh peneliti berdasar kepada masalah yang terdapat di lokasi penelitian.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini juga adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsionalitas dengan tujuan meningkatkan kebutuhan ekonomi, menentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta meningkatkan kebudayaan dan kelestarian lingkungan.

⁶Firmansyah, Rahim, Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Jakarta, (2012), hlm 16

⁷Sugiono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, Alfabeta: Bandung, 2012

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Fungsi Manajemen

A. Perencanaan

Pengelolaan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berbasis kepada masyarakat ataupun komunitas dengan sumber daya manusia dan keunikan lokal baik itu fisik maupun nonfisik sebagai faktor utama dalam penggerak suatu pariwisata. Secara umum perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan, pembuatan strategi dalam pencapaian tujuan serta pengembangan rencana kerja suatu organisasi. Perencanaan yang dimaksud bagaimana perencanaan pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka yang melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ini diantaranya ninik mamak, pemerintah nagari dan masyarakat. Tahap perencanaan dalam proses pengelolaan yaitu proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, kapan pelaksanaannya, dan dimana pelaksanaannya.

Dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka dalam proses perencanaannya dikelola langsung oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Tangaya) dengan pengawasan dan bantuan dari pemerintahan nagari serta ninik mamak supaya nantinya apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan wawancara dengan Pemerintahan Nagari Saniang Baka, Ahmad Dumyaldi mengatakan⁸ :

“Pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka dikelola oleh kelompok pariwisata yang sudah di SK kan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Solok. Untuk pengelolaan sudah diserahkan kepada kelompok pariwisata, jadi tahap awal yang dikelola pertama sekali oleh kelompok yang baru terjalankan Tracking Aia Tajun Batang Baso untuk yang lain masih dalam tahap pembahasan. Karena yang pertama ini masih tahap percobaan diselesaikan satu persatu terlebih dulu supaya jelas kemajuan dari obyek wisata jika obyek wisata yang dikembangkan sudah tau maka dikembangkan obyek wisata yang lainnya”.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Tata kelola tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya koordinasi dalam sebuah lembaga yang menjalankan perannya. Dalam hal ini Pokdarwis sebagai pengelola dengan dukungan dan pengawasan dari semua pemangku kepentingan kepariwisataan berbasis masyarakat dijadikan sebagai peluang dan potensi besar dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat. Peran organisasi dalam

⁸Wawancara dengan Ahamd Dumyadi , Wali Nagari Saniang Baka, Saniang Baka , 11 November 2021

pengelolaan pariwisata sangatlah penting khususnya dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka. Dalam proses pengelolaan pariwisata tidak luput dari adanya proses pengorganisasian dimana adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis operasional dan teknis penunjang.

Pokdarwis Tangaya berdiri dikarenakan adanya kepedulian masyarakat dalam pengembangan aset potensi wisata di Nagari Saniang Baka. Pemerintah Nagari telah menyerahkan sepenuhnya perihal peranan Pokdarwis dalam keorganisasiannya dan bagaimana Pokdarwis menentukan setiap pekerjaan anggotanya dalam pengelolaan ini. Hal ini berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dengan Ahmad Dumyaldi mengatakan ⁹:

“Yang dari pihak nagari untuk pengorganisasian menyerahkan sepenuhnya kepada Pokdarwis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebab jika pemerintah nagari juga ikut memberikan pengorganisasian, maka nanti akan timbul benturan. Tetapi tetap dalam pengorganisasian pengelolaan parawisata oleh Pokdarwis ini diawasi oleh pemerintah nagari”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Eldo Adzkia perihal peranan organisasi Pokdarwis Tangaya membenarkan hal tersebut, mengatakan:

“Sama seperti pekerjaan yang lainnya, yang mana setiap kelompok dan anggota memiliki tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya Belukar, Anggota Belukar ini menemukan adanya Bunga Raflesia yang ditemukan di alam Saniang Baka. Jadi hal ini dapat menambah nilai ekonomis untuk pengelolaan pariwisata yang akan datang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah nagari dan Pokdarwis Tangaya telah menentukan peranannya masing-masing guna menjadikan potensi obyek wisata yang ada di Nagari Saniang Baka terorganisasi dengan baik serta mempermudah dalam proses pengelolaannya. Hal ini berkaitan dengan pentingnya sebuah pengorganisasian dalam pengelolaan pariwisata dan juga menghindari nantinya perbedaan pendapat yang dapat mengganggu proses pengelolaan pariwisata dan kenyamanan masyarakat.

C. Pengarahan

Pengarahan merupakan suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan bias terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Begitu juga pada pengelolaan pariwisata supaya dapat berjalan dengan baik maka strategi yang dijalankan haruslah sesuai dengan pengelolaan ini. Dalam penelitian ini proses pengarahan meliputi proses pengorganisasian. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana proses pengorganisasian

⁹Ibid

yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka. Pengarahan sendiri dilakukan dengan mengingatkan serta memberikan bantuan setiap peranan yang terlibat, supaya bagaimana nantinya pengelolaan pariwisata ini dapat berjalan dengan baik dan strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan.

Pengelolaan pariwisata yang ada di Nagari Saniang Baka saat ini dalam tahap pengembangan dan dalam tahap awal melangkah tentunya banyak hal yang harus dibenahi. Untuk itulah apa yang direncanakan harus berjalan dengan tepat. Seperti ikonnya ada tetapi harga jualnya belum ada. Pengelolaan dalam tahap awal maka untuk strategi yang dijalankan, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Dumyaldi, mengatakan¹⁰ :

“Dengan adanya pengelolaan saat ini dan potensi wisata yang ada di nagari. Nanti pengelola akan memunculkan program-program kerja pada potensi wisata yang ada di Nagari Saniang Baka. Pokdarwis harus membimbing obyek pertama ini sebagai percontohan (aia tajun baso). karena ini akan berpengaruh dengan pengembangan obyek wisata yang lainnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan strategi yang digunakan dalam tahap awal ini untuk memfokuskan pada satu tujuan. Usahakan yang mana lebih diprioritaskan untuk saat ini seperti saat ini fokus pada pengelolaan aia tajun baso dan sudah ada paket tournya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Eldo Adzkie perihal strategi yang dijalankan, mengatakan :

“Strategi pengelolaan saat ini dalam tahap uji coba, yang mana mengumpulkan stakeholder yang ada. Perlunya regulasi antara masyarakat, pemerintahan nagari dan setelah itu para–para investor dalam bentuk tahap perencanaan, Jadi potensi yang ada tidak akan bisa digarap kalau tidak ada dana yang mendukung, dana yang mendukung ini yang harus dicari, dikelola dan dikembangkan melalui kelompok sadar wisata ini”.

D. Pengkoordinasian

Suatu Proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif. Sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan, setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para pengelola dan pemangku kepentingan yang terlibat, maka setiap orang yang terlibat ini menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Pokdarwis Tangaya dalam mengerahkan setiap anggota dan menentukan tugasnya masing-masing dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka telah diserahkan kepada Pokdarwis Tangaya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Dumyaldi¹¹, mengatakan :

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

“Kasusnya sama untuk menentukan pekerjaan kami dari pemerintah nagari sepenuhnya menyerahkan kepada Pokdarwis dalam menentukan peranannya dalam pengelolaan pariwisata ini”

Sedangkan dalam menjalankan tugas dan peranan, peran ninik mamak sebagai pengawas, berdasarkan wawancara peneliti dengan Irfan Umir mengatakan:

“KAN mendukung saja kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata ini. Kita semua yang terlibat dalam pengelolaan ini sudah diatur masing-masing tugasnya dan kita sama-sama saling percaya. Mengelola disini kan seperti merawat aset nagari maka haruslah kita memberikan dukungan”.

Berdasarkan dari wawancara tersebut disimpulkan setiap pemangku kepentingan punya tugas masing-masing dan untuk pokdarwis sepenuhnya mendapatkan amanat dalam pengelolaan, pembagian tugas masing-masing anggota dalam pengelolaan ini serta bertanggung jawab dengan tugasnya. Pengawasan dan bantuan dari pemerintah nagari dan ninik mamak terhadap kinerja setiap peranan anggota Pokdarwis supaya tidak ada menyimpang dari apa yang direncanakan.

E. Pengendalian

Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lewat pengendalian maka nantinya dapat menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu perencanaan tertentu telah dicapai seperti sudah didapatkan manfaat dari perencanaan atau adanya masalah dalam perencanaan. Pengendalian yang meliputi proses pengawasan merupakan usaha dalam menilai guna mengetahui kenyataan yang telah diperoleh dengan membandingkan proses pelaksanaan program kerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan yang sudah disebutkan, permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka berhubungan dengan kondisi sosial budaya di Nagari Saniang Baka. Sementara itu dalam pelaksanaannya permasalahan infrastruktur yang belum memadai dan permasalahan lahan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Dumyaldi mengatakan¹²:

“Seandainya jika terjadi permasalahan, itu harus dipilah terlebih dahulu. Jika permasalahan antar kelompok dan anggota itu bisa diselesaikan oleh kelompok sendiri. Akan tetapi permasalahan yang menyangkut nagari tentu ada andil pemerintah ikut serta dalam penyelesaian masalah. Contohnya Pokdarwis mengembangkan pariwisata terkendala dengan lahan, Pokdarwis berkoordinasi dengan nagari disitulah letak peran wali nagari, berkoordinasi dengan KAN, kemudian masyarakat yang memiliki tanah. Dalam penyelesaian masalah Pokdarwis

¹²Ibid

dengan lembaga- lembaga terkait ikut andil dalam penyelesaian masalah misalnya adanya pengembangan pariwisata dalam bentuk aturan dan ada pariwisata yang berkembang yang perlu patenkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari Saniang Baka”.

Berdasarkan wawancara tersebut apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan, disinilah peran ninik mamak dan pemerintah nagari sebagai pengawas dalam pengelolaan pariwisata ini. Terutama permasalahan yang menyangkut dengan masyarakat langsung seperti pembebasan lahan. Untuk penyelesaiannya diusahakan lewat musyawarah dan nantinya hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Pernyataan tersebut dibenarkan berdasarkan wawancara peneliti dengan Irfan Umir, mengatakan:

“Yang dari KAN jika ada masalah dalam pengelolaan maka kami sebagai ninik mamak akan membantu menyelesaikan. Untuk masalahnya, seperti berhubungan dengan batas ulayat atau lahan warga bisa diusahakan dan dimusyawarahkan oleh pihak yang terkait nantinya dan akan dirundingkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik”.

2) Prinsip Pokok Pariwisata Berbasis Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata dan masyarakat ialah stakeholder. Dalam pengelolaan ini supaya dapat berjalan dengan baik maka harus ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Berdirinya Pokdarwis dinagari menunjukkan bahwa masyarakat Saniang Baka ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ini. Masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis, masyarakat sekitar khususnya yang tinggal disekitar objek wisata juga harus diberikan arahan sehingga nantinya terjalin komunikasi yang baik. Berikut Uraian tiga prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka yaitu:

A. Mengikut Sertakan Anggota Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan.

Untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dalam pengelolaan pariwisata, maka setiap pemangku kepentingan yang terlibat memainkan peranan mereka masing-masing. Supaya berjalan dengan lancarnya tugas masing-masing peranan yang terlibat, dalam proses pelaksanaannya harus mendapatkan bantuan dan partisipasi masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat melibatkan dan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat ialah mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka masyarakat belum banyak memberikan pendapat dan partisipasi yang masih rendah. Keikutsertaan masyarakat masih dalam sebatas antusias dalam artian ikut meramaikan dan menikmati obyek wisata ini. berdasarkan wawancara peneliti dengan Ardi Firdaus, mengatakan :

Untuk Partisipasi masyarakat masih rendah, belum ada kesadaran untuk memulai ini yang susah. Mereka antusias hanya saat diadakan event. Masyarakat hanya sebatas

menikmati dan meramaikan obyek wisata ini. Jadi pemikiran masyarakat bagaimana obyek ini bisa meningkatkan kesejahteraan ini yang belum ada. Masyarakat sekitar sini harapan mereka sebenarnya sangat besar untuk pengelolaan wisata tapi yang namanya baru mulai jadi mungkin belum bisa menarik minat masyarakat. Akhirnya mereka lebih tertarik merantau seperti “iyo ka jalan wisata tu? ancak marantau lai jaleh pitih masuaknyo”.

Pernyataan diatas sejalan dengan wawancara peneliti dengan Desri Vendra perihal masyarakat menunggu apa yang disampaikan, mengatakan :

“Saya sendiri mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintahan nagari dan kepala jorong. Apa yang disampaikan nantinya saya ikut menolong, sebenarnya kami dari masyarakat sangat antusias dengan pengelolaan ini tapi yang dari kami secara realistis untuk saat sekarang belum bisa kami andalkan untuk meningkatkan ekonomi”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan masyarakat tidak berpartisipasi aktif

B. Adanya Kepastian Masyarakat Lokal Menerima Manfaat Dari Kegiatan Kepariwisataan

Berdirinya Pokdarwis Tangaya di Nagari Saniang Baka merupakan salah satu bagian dari Pariwisata Berbasis Masyarakat karena adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata ini. Permasalahannya ialah bagaimana nantinya untuk menarik minat masyarakat umum untuk lebih tertarik dengan pengelolaan ini. Karena pengelolaan ini masih dalam tahap awal masyarakat belum tertarik. Untuk mensukseskan pengelolaan pariwisata haruslah membutuhkan dukungan dari masyarakat umum dan bukan hanya masyarakat yang tergabung dalam anggota Pokdarwis. Salah satu prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat ialah adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan. Pengelolaan yang masih dalam tahap awal ini belum menarik minat masyarakat dikarenakan masyarakat belum merasakan manfaatnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Desri Vendra membenarkan hal tersebut, mengatakan :

“Untuk saat ini belum terlalu berdampak untuk masyarakat. Seperti paket tour aia tajun sudah ada dirasakan dampaknya tapi belum bisalah dikatakan berdampak besar. Mungkin kedepannya bisa jadi 5 tahun lagi dirasakan masyarakat. Kalau memang rezeki pengelolaan ini kedepannya berhasil harapan saya masyarakat jangan pergi ke rantau semua. Keluarga saya sendiri juga ada yang merantau alasannya untuk mencari uang kalau dikampung terus gak bakal berkembang susah dapatkan uang. Makin lama makin sepi jorong ini”.

Bersama disini ialah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pemerintah nagari, ninik mamak, dan masyarakat. Dalam proses menciptakan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada tanpa merusak alam dan tidak mengganggu

kenyamanan masyarakat. Untuk prospeknya sangat luar biasa, saat ini memang belum terlalu berdampak, jadi yang menariknya ialah bagaimana manfaat pengelolaan ini kedepannya apakah mampu merubah sebuah paradigma merantau di dalam masyarakat Nagari Saniang Baka. Dengan adanya proses awal perencanaan pengelolaan ini mengimplikasikan bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sangat serius dalam pengembangan pariwisata. Tindakan perencanaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional oleh para pihak terlibat dalam upaya pencapaian tujuan bersama.

C. Pendidikan Kepariwisataaan Bagi Masyarakat Lokal.

Kepariwisataan yang ada di Nagari Saniang Baka dalam proses menuju pariwisata yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan pariwisata. Supaya pengelolaan ini berjalan dengan baik haruslah ada bantuan, pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Pokdarwis. Pemerintah nagari dan ninik mamak sebagai pengawas dalam pengelolaan ini haruslah memberikan pembinaan serta pengarahan bagi masyarakat. Adanya pembinaan nanti kedepannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Tidak hanya masyarakat dalam keanggotaan Pokdarwis tetapi juga masyarakat sekitar khususnya yang dekat dengan obyek wisata. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Irfan Umir, mengatakan :

“Untuk bantuan misalnya masalah dana, ada dianggarkan dari pemerintah nagari memang baru seadanya. Untuk aset pariwisata ada banyak tapi pengembangan lebih lanjut tergantung dana. Apalagi akses ke tempat pariwisata butuh transportasi yang lancar. Contoh aia tejun tujuh lenggek yang indah dari namanya mencengangkan dan indah. Tetapi ketika berkunjung ke lokasi masih butuh pembenahan. Dana ini yang saat ini kita cari dan usahakan. Untuk perkembangan Pokdarwis Tangaya ada beberapa kegiatan seperti lomba-lomba, juga sudah mempunyai sekretariat sendiri dan dikelola oleh orang-orang yang bersemangat”.

Berdasarkan wawancara diatas, seperti permasalahan yang sebelumnya masih berhubungan dengan pendanaan yang masih seadanya. Dalam proses perencanaan dan pengeorganisasian telah disebutkan nagari punya obyek wisata tapi belum ada harga jualnya. Inilah yang membuat pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka seperti mengembang atau masih berjalan ditempat dan belum mencapai standar optimal. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Dumyaldi juga mengatakan hal yang sama¹³ :

“Yang dari Pemerintahan Nagari selalu mendukung. Seperti bagaimana pokdarwis bisa berjalan dan menjalankan kegiatannya. Kalau dari segi pendanaan memang baru seadanya tapi dari awal berdiri Pokdarwis tahun 2019 sampai sekarang setiap tahun diberi bantuan dan untuk fasilitas pemasaran seperti pembuatan video pendek difasilitasi dengan pembelian drone. Untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan setiap

¹³Ibid

tahun mendatangkan instruktur dari dinas pariwisata karena mereka bisa berkoordinasi dalam pengelolaan pariwisata”.

3) Peranan Pemangku Kepentingan Pariwisata

Tata kelola pariwisata di Nagari Saniang Baka dijalankan oleh Pokdarwis Tangaya. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan diawasi oleh Pemerintah Nagari dan Ninik Mamak. Pengelolaan pariwisata yang masih dalam tahap awal sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat nagari, karena dalam dunia pariwisata agar berjalan dengan baik. Setiap peranan pemangku kepentingan harus saling bekerja sama. Menurut Sunaryo, Bahwasanya terdapat tiga pemangku kepentingan dalam kepariwisataan yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat¹⁴

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka saat ini melibatkan pemerintah nagari, ninik mamak dan masyarakat (Pokdarwis). Supaya pengelolaan dalam tahap awal ini dapat berjalan dengan baik, maka harus ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat umum. Karena tujuan pengelolaan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya

Dalam menjalankan peranannya sebagai pemangku kepentingan pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka. Pemerintah Nagari ikut merencanakan dan mengawasi pengelolaan. Ninik Mamak ikut memberikan masukan dan mengawasi pengelolaan dan Pokdarwis yang bergerak dari masyarakat bertugas merencanakan dengan hak sepenuhnya dalam pengelolaan. Partisipasi masyarakat umum sangat dibutuhkan supaya nantinya pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan sehingga dalam prosesnya masalah tersebut tidak menghambat pengelolaan pariwisata.

4. KESIMPULAN

Perencanaan dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka sedang dalam tahap pengembangan. Saat ini yang baru berjalan proses dari perencanaan ialah Paket Tour Aia Tajun Batang Raso dan untuk paralayang sempat akan mengadakan event tapi dibatalkan karena covid. Pengelolaan yang saat ini dalam tahap baru melangkah, dalam pelaksanaannya adanya permasalahan seperti infrastruktur yang belum memadai dan obyek wisata yang dikelola melewati lahan masyarakat. Untuk dampak perencanaan belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan belum menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka.

Pengorganisasian dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka diberikan kepada Pokdarwis Tangaya. Dalam peranannya Pokdarwis Tangaya membagi tugas

¹⁴Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava medi : Yogyakarta (2013)

masing-masing setiap anggotanya dengan nantinya dalam pelaksanaannya dilapangan dibantu dan diawasi oleh pemerintah nagari dan ninik mamak serta keterlibatan masyarakat dalam menjalankannya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya dilapangan masih hanya sebatas antusias. Belum ada dari masyarakat untuk berpikiran bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan ekonomi, keterlibatan masyarakat baru sebatas saat akan diadakan event atau pembersihan jalan. Jadi masyarakat belum memprioritaskan pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka saat ini.

Pengarahan dalam pengelolaan pariwisata ini memfokuskan strategi yang dijalankan yaitu memfokuskan pada satu tujuan yang dikelola, dalam artian saat yang diprioritaskan sudah berjalan dengan baik baru melangkah ke tahap berikutnya. Untuk masukan dalam pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka, ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Nagari Saniang Baka yang sangat kental dengan Agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu pengelolaan pariwisata diarahkan menjadi konsep pariwisata halal di Nagari Saniang Baka, supaya nantinya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Dalam menjalankan tugas masing-masing setiap anggota Pokdarwis sudah ditentukan. Dengan tujuan pengkoordinasian ini berjalan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan dapat dicapai. Dalam menjalankan tugasnya ini setiap anggota Pokdarwis mendapatkan pengawasan dan bantuan apabila terjadi permasalahan, supaya apa yang dilaksanakan tidak menyimpang dari apa yang direncanakan.

Pengendalian dalam proses pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka berkaitan dengan masalah pembebasan lahan. Dalam prosesnya semua pihak yang terlibat nantinya akan dilakukan mediasi supaya nantinya mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak sampai menimbulkan konflik serta menghambat jalannya pengelolaan pariwisata ini. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Nagari Saniang Baka tidak menimbulkan konflik didalam masyarakat dan mengganggu masyarakat. Karena apabila terjadi permasalahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat diselesaikan secara baik-baik. Begitu juga dengan lingkungan alam yang dijaga kebersihannya dan jangan sampai merusak alam, karena pariwisata ini berbaur dengan alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, Imade. 2017. *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Bali : Cakra Pres.
- Bambang, Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Medi.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Jeffries, D, 2001. *Government and Tourism*. Oxford : Butterworth Heineman.
- Rahim, Firmansyah, 2012. *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sugiono, 2012. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

UNWTO 2017. Organisasi pariwisata dunia atau yang dikenal dengan world tourism. html
hlm 2 tanggal 28 Februari 2021 Jam 14.00.

Wawancara dengan Ahamd Dumpyadi , Wali Nagari Saniang Baka, Saniang Baka , 11
November 2021.